

ANALISIS MANAJEMEN ASET PERLENGKAPAN JALAN DI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA PROBOLINGGO JAWA TIMUR

Hakiki Amalia^{1*}, Sutanto Hidayat², Erni Yulianti³

¹*Jurusan Teknik Sipil, ITN Malang, Jl. Sigura-gura No.2 Malang
Email: amaliahakiki28@gmail.com*

²*Jurusan Teknik Sipil, ITN Malang, Jl. Sigura-gura No.2 Malang
Email: sutantohidayat@yahoo.com*

³*Prodi Teknik Sipil, Politeknik Negeri Semarang, Jl. Sigura-gura No.2 Malang
Email: yulianti.erni1976@gmail.com*

ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah pada umumnya adalah karena pelaksanaan dalam pengelolaan aset yang belum sesuai dengan perencanaan, prosedur pengelolaan aset daerah secara fisik dan yuridis yang belum terlaksana dengan baik dan benar, dan ketidaktertiban dalam pengelolaan data base aset, hal tersebut mengakibatkan aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya atau bahkan menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memanfaatkan aset dimasa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan pengelolaan aset secara terencana, terintegrasi dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam tempo yang singkat, diperlukan suatu sistem informasi pendukung pengambilan keputusan atas aset (*decision supporting system*), yang lazim dikenal sebagai Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). Sehingga diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan dalam pengelolaan aset daerah. Aset perlengkapan jalan di kota Probolinggo sangat perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui permasalahan dan tindakan yang akan dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pengumpulan data melalui kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 40 responden. Metode analisis data menggunakan regresi linier dengan bantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Hasil analisis manajemen aset menemukan bahwa (1). Manajemen aset perlengkapan jalan pengawasannya belum optimal, (2). Permasalahan yang mempengaruhi pengelolaan manajemen aset adalah lemahnya pendataan, minimnya anggaran pemeliharaan, kurangnya kapasitas SDM, ketiadaan sistem informasi aset yang terintegrasi, dan rendahnya koordinasi antar bidang, (3). Manajemen aset berpengaruh positif terhadap pengamanan dan pengawasan aset.

Kata kunci : Manajemen Aset, Perlengkapan Jalan, Tertib Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Manajemen aset negara sering disebut pula sebagai pengelolaan barang milik negara. Dalam peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Siregar (2004), tujuan manajemen aset, yaitu efisiensi pemanfaatan dan pemilikan, terjaga nilai ekonomis dan objektivitas dalam pengawasan dan pengendalian peruntukan, penggunaan serta alih penguasaan.

Konsep manajemen aset banyak diadopsi guna mengoptimalkan pengambilan keputusan dari sisi penyeimbangan biaya, risiko dan kinerja bagi perusahaan-perusahaan yang padat aset (Trindade dkk., 2019; Maletic dkk., 2022). Namun perubahan pendayagunaan aset fisik antar entitas yang berbeda tentunya tidak hanya berdampak pada siklus hidup, melainkan risiko pemeliharaan terhadap aset berkelanjutan. Hal ini guna memastikan keamanan, ketersediaan dan keandalan serta penyediaan produk sesuai kualitas yang dibutuhkan (Ghaleb & Taghipour, 2022). Dilanjutkan oleh Lima dkk., (2021) bahwa manajemen aset memungkinkan organisasi untuk mewujudkan nilai dan manfaat keberlanjutan dari asetnya. Hal ini dapat dicapai diantaranya apabila pemeliharaan diterapkan dengan tepat (Ghaleb & Taghipour dalam Nugraha, 2023).

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah pada umumnya adalah karena pelaksanaan dalam pengelolaan aset yang belum sesuai dengan perencanaan, prosedur pengelolaan aset

daerah secara fisik dan yuridis yang belum terlaksana dengan baik dan benar, dan ketidaktertiban dalam pengelolaan data base aset, hal tersebut mengakibatkan aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya atau bahkan menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memanfaatkan aset dimasa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan pengelolaan aset secara terencana, terintegrasi dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam tempo yang singkat, diperlukan suatu sistem informasi pendukung pengambilan keputusan atas aset (*decision supporting system*), yang lazim dikenal sebagai Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). Sehingga diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan dalam pengelolaan aset daerah. Aset perlengkapan jalan di kota Probolinggo sangat perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui permasalahan dan tindakan yang akan dilakukan.

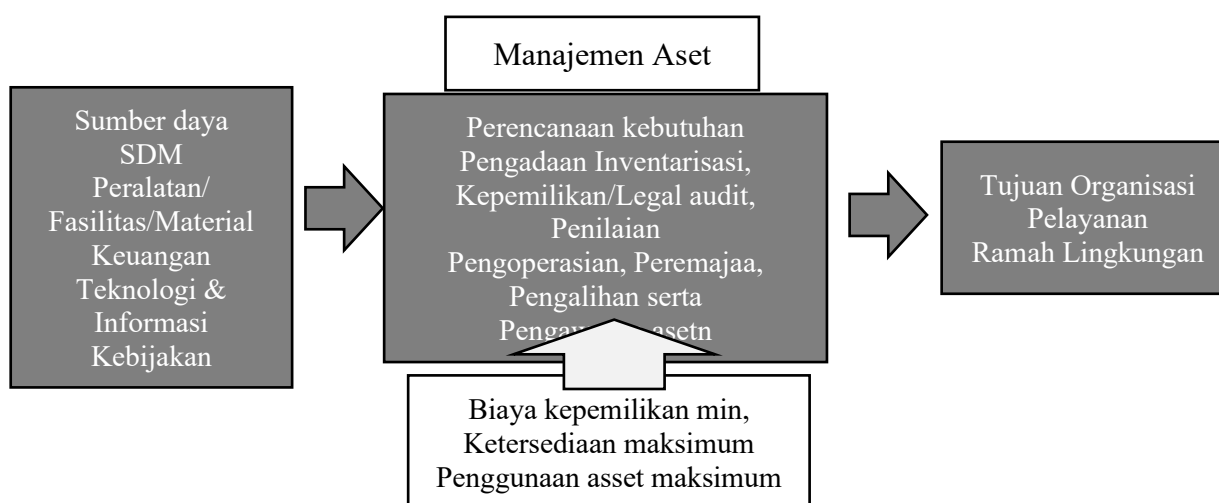
Berdasarkan uraian tersebut, pengelolaan aset perlengkapan jalan menjadi aspek krusial dalam mendukung keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah perkotaan. Aset perlengkapan jalan yang tidak dikelola secara sistematis berpotensi menimbulkan risiko keselamatan pengguna jalan serta inefisiensi pemanfaatan anggaran daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap manajemen aset perlengkapan jalan guna mengidentifikasi permasalahan yang terjadi serta merumuskan langkah perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset di Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Probolinggo.

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen aset

Manajemen Aset berasal dari dua kata yaitu “Manajemen” dan “Aset”. Manajemen menurut George R. Terry adalah “*management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, utilizing in each both science and art, and followed in order to accomplish predetermined objective*”. Artinya, manajemen adalah proses yang berbeda yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, pemanfaatan disetiap ilmu pengetahuan dan seni, dan diikuti dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Manajemen aset mencakup proses perencanaan, perancangan, pengorganisasian, penggunaan, pemeliharaan sampai penghapusan serta di dalamnya pengawasan aset. Proses ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur selama siklus hidup aset. Manajemen aset berupaya melakukan pengoptimalisasian penggunaan aset dalam rangka memberi manfaat dalam pemberian layanan dan pengembalian keuangan. Manajemen aset yang baik dan meminimalkan biaya, memaksimalkan ketersediaan aset, dan memaksimalkan utilisasi aset. Manajemen aset di lingkungan pemerintah dikenal dengan istilah manajemen barang milik negara/daerah. Britton dalam Siregar (2004) mengatakan bahwa *asset management* adalah *define good asset management in term of measuring the value of properties (asset) in monetary term and employing the minimum amount of expenditure on its management*

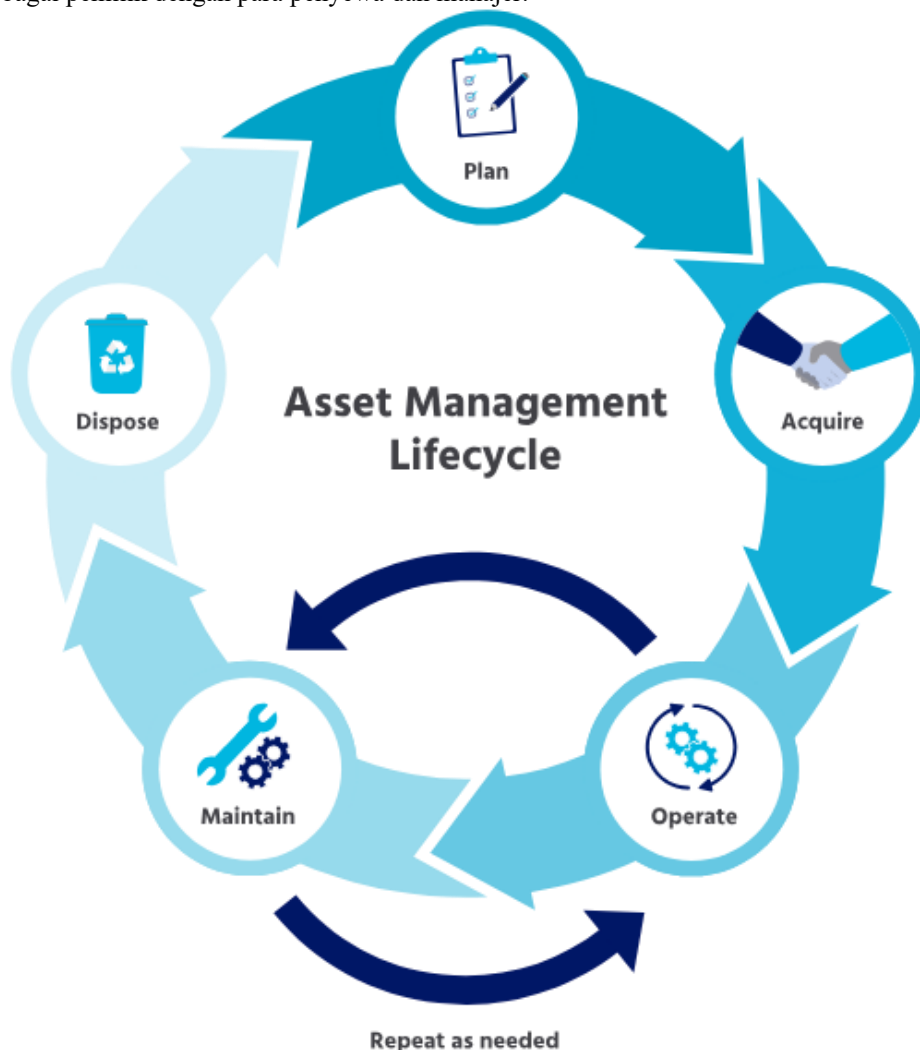


Gambar 1. Manajemen Aset

Dari pemahaman beberapa literatur, manajemen aset dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan

untuk mengelola kekayaan secara optimal, yaitu meminimalisasi biaya kepemilikan, memaksimalkan ketersediaan dan penggunaan aset melalui proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, kepemilikan/legal audit, penilaian, pengoperasian, pemeliharaan, penghapusan, peremajaan, pengalihan, serta pengawasan aset untuk mendukung tujuan organisasi dalam melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan ramah lingkungan.

Penelitian tentang hubungan manajemen aset terhadap optimalisasi dan pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah masih sangat terbatas sehingga dalam penulisan ini menggunakan library research (tinjauan kepustakaan) guna melihat yang seharusnya dilakukan dalam pengelolaan aset Pemerintah Daerah dengan yang terjadi atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sekarang khususnya pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan keuangan yang kompherensif, penyusunan neraca menunjukkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan hal yang tidak bisa dihindari dan merupakan hasil akhir dari proses pengelolaan keuangan daerah. Siregar (2016) menyebutkan dalam manajemen aset ada 4 tahap kerja yang saling berhubungan dan saling terintegrasi satu sama lain, hal tersebut meliputi inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, dan identifikasi aset. Hidayati (2016) manajemen aset sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan properti di lingkungan Pemda untuk mencerminkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Permasalahan klasik yang sering dijumpai dalam pengelolaan aset properti adalah status hukum properti yang tidak jelas. Artinya, siapa sebenarnya yang mempunyai hak kepemilikan atas aset tersebut sering menjadi sengketa di antara unit-unit yang ada. Kurangnya kebudayaan efisiensi untuk manajemen aset ini mengakibatkan berbagai hubungan perjanjian menjadi tidak optimal serta tidak adanya hubungan yang relevan antara Pemerintah sebagai pemilik dengan para penyewa dan manajer.



Gambar 2. Skema manajemen aset perlengkapan jalan

Properti selain sebagai investasi juga merupakan aset. Pengertian aset dapat dilihat dalam kamus Barron yang berjudul *Dictionary of real estate terms*, dapat diartikan sebagai “Suatu yang Memiliki Nilai”. Pengertian tersebut bila dikaitkan dengan properti maka dapat dijabarkan melalui beberapa aspek sebagai berikut:

1. Memiliki nilai ekonomi yang terkait dengan nilai pemanfaatan tertinggi dan terbaik (*highest and best use*).
2. Menghasilkan pendapatan dari pengoperasian properti
3. Memiliki fisik, fungsi dan hak penguasaan yang baik
4. Economical life-time yang panjang.

Dari berbagai konsep dan tahapan manajemen aset yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa manajemen aset merupakan suatu proses terpadu yang menekankan keseimbangan antara perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan aset secara berkelanjutan. Penerapan manajemen aset yang baik di sektor publik tidak hanya bertujuan menjaga nilai ekonomis aset, tetapi juga memastikan bahwa aset tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi pelayanan masyarakat, khususnya pada sektor transportasi dan keselamatan lalu lintas.

Optimalisasi pemanfaatan aset

Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal, dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut, Sutrisno (2004). Pada tahap ini aset-aset yang dimiliki negara diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan potensi dari aset tersebut. Optimalisasi pemanfaatan aset adalah hubungan antara kegunaan layanan dan imbalan keuntungan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi aset merupakan pengoptimalan pemanfaatan dari sebuah aset dimana dapat menghasilkan manfaat yang lebih atau juga mendatangkan pendapatan. Analisis optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset digunakan untuk mengidentifikasi dan memilah aset yang masuk ke dalam aset operasional atau aset non operasional (Siregar, 2004). Untuk aset operasional, dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui apakah aset operasional tersebut sudah optimal atau belum penggunaan dan pemanfaatannya. Sedangkan untuk analisis terhadap aset non operasional yang dilakukan terhadap kondisi eksisting suatu aset. Untuk mengetahui pemanfaatannya sudah optimal, dilihat dari penggunaan aset dari aspek ekonomis. Sebagaimana disebutkan oleh Siregar (2004) bahwa untuk mengoptimalkan suatu aset harus dibuat sebuah formulasi strategi untuk meminimalisasi dan menghilangkan ancaman dari faktor lingkungan dan untuk aset yang tidak dapat dioptimalkan harus dicari penyebabnya. Menurut Siregar (2004) bahwa optimalisasi pengelolaan aset itu harus memaksimalkan ketersediaan aset (*maximize asset availability*), memaksimalkan penggunaan aset (*maximize asset utilization*), dan meminimalkan biaya kepemilikan (*minimize cost of ownership*). Untuk mengoptimalkan suatu aset dapat dilakukan melalui *Highest and Best Use Analysis*, Siregar (2004).

Hal ini dapat dilakukan dengan meminimalisasi atau menghilangkan hambatan atau ancaman atas pengelolaan aset-aset tersebut. Sehingga optimalisasi dari suatu aset yang berstatus *idle capacity* bisa dilakukan Siregar (2004), menyebutkan bahwa tujuan optimalisasi aset secara umum adalah sebagaimana berikut:

1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua aset. Kegiatan ini meliputi bentuk, ukuran, fisik, legal, sekaligus mengetahui nilai pasar atas masing-masing aset tersebut yang mencerminkan manfaat ekonominya
2. Pemanfaatan aset. Pada tahap ini pengelola aset harus mengetahui apakah aset telah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.
3. Terciptanya suatu sistem informasi dan administrasi sehingga tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan aset.

Optimalisasi aset dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu studi optimalisasi aset dan perantara investasi. Studi optimalisasi aset dapat dilakukan antara lain dengan identifikasi aset, pengembangan basis data aset, studi *Highest and Best Use* atas aset, dan pengembangan strategi optimalisasi aset (Siregar, 2004).

Highest and Best Use (HBU) didefinisikan sebagai kegunaan yang paling layak, memungkinkan, dan sah dari tanah kosong atau tanah terbangun yang secara fisik memungkinkan, tepat didukung, layak secara finansial, dan yang menghasilkan nilai tertinggi dari tanah.

Optimalisasi pemanfaatan aset menjadi bagian penting dalam manajemen aset daerah karena berkaitan langsung dengan efektivitas pelayanan publik dan efisiensi penggunaan anggaran. Aset yang tidak dimanfaatkan

secara optimal berpotensi menjadi beban biaya pemeliharaan tanpa memberikan manfaat yang sebanding. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan strategis dalam mengelola aset, termasuk melalui evaluasi kondisi eksisting, analisis kebutuhan aktual, serta penyesuaian pemanfaatan aset dengan tujuan organisasi dan kepentingan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian disusun untuk memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam menganalisis manajemen aset perlengkapan jalan di Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Probolinggo. Pendekatan penelitian ini diarahkan untuk memperoleh gambaran kondisi eksisting pengelolaan aset serta mengidentifikasi hubungan antara manajemen aset dengan pengamanan dan pengawasan aset melalui pengolahan data kuantitatif.

Jenis data dan pengumpulan data

Data Primer

Daftar pertanyaan (kuisisioner) dalam bentuk angket dibuat untuk memperoleh data-data primer yang disusun berdasarkan parameter analisis yang dibutuhkan dan relevan sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini yang ditujukan kepada responden yang sudah ditentukan sebelumnya. Responden ini diberikan kepada pegawai – pegawai di Organisasi Perangkat Daerah terkait yaitu Dinas Perhubungan dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah pada Pemerintah Kota Probolinggo

Data Sekunder

Data sekunder didapat dari hasil studi pustaka yang dapat berbentuk buku peraturan pemerintah, buku monograph, artikel atau jurnal, yang terkait dengan aset perlengkapan jalan.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan sampel 40 orang yang mengetahui dan terlibat terkait Aset di Kota Probolinggo yang dalam hal ini ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dan Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun kriteria skor jawaban pertanyaan-pertanyaan yang terdapat kuesioner menggunakan skala likert (Riduwan, 2005) sebagaimana dijelaskan pada BAB II yaitu :

1. = Sangat Tidak Setuju
2. = Tidak Setuju
3. = Netral (Tidak Berpendapat)
4. = Setuju
5. = Sangat Setuju

Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil survei (kuesioner) nantinya diolah untuk memperoleh informasi dalam bentuk tabel. Hasil olahan data tersebut digunakan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Pengolahan data hendaknya memperhatikan jenis data yang dikumpulkan dengan berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai. Ketepatan dalam teknik analisis sangat mempengaruhi ketepatan hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier dengan bantuan program SPSS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk analisis deskriptif dan inferensial untuk menggambarkan kondisi manajemen aset perlengkapan jalan serta pengaruhnya terhadap pengamanan dan pengawasan aset. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan konsep dan teori manajemen aset, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan dan implikasi pengelolaan aset perlengkapan jalan di Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Probolinggo.

Manajemen aset perlengkapan jalan kawasan tertib lalu lintas kota probolinggo.

Manajemen aset perlengkapan jalan di Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Kota Probolinggo saat ini menghadapi berbagai persoalan mendasar yang berkaitan dengan pencatatan, pemeliharaan, optimalisasi, hingga pengawasan aset yang belum berjalan secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian yang mencakup lima dimensi utama manajemen aset (inventarisasi, legal audit, penilaian, optimalisasi, dan pengembangan aplikasi), nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,44 mencerminkan bahwa pengelolaan aset berada pada kategori sedang, dengan berbagai kelemahan substantif pada aspek implementasi teknis di lapangan.

Dimensi inventarisasi aset yang merupakan fondasi awal dalam siklus manajemen aset menunjukkan

nilai rata-rata 3,35, dengan temuan utama bahwa sebagian besar perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, warning light, dan marka jalan tidak tercatat secara administratif. Observasi langsung di empat ruas jalan utama (Jalan H. Cokroaminoto, Jalan Gatot Subroto, Jalan Soekarno Hatta, dan Jalan Pahlawan) menunjukkan bahwa 60 unit dari total 235 rambu lalu lintas tidak tercatat dan 37 unit dalam kondisi tidak berfungsi. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem inventarisasi yang seharusnya menjadi pintu masuk pengelolaan aset secara menyeluruh. Siregar (2004) menegaskan bahwa proses inventarisasi harus mencakup identifikasi, klasifikasi, dan pencatatan aset secara berkelanjutan agar informasi aset dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ketidakteraturan pencatatan ini juga sejalan dengan temuan Basuki (2019) yang menunjukkan bahwa ketidaktepatan dalam pelaporan dan klasifikasi aset menghambat proses pengelolaan aset secara efektif di lingkungan pemerintahan.

Selanjutnya, dimensi legal audit dan penilaian aset yang seharusnya memperkuat legitimasi dan nilai ekonomi aset belum menunjukkan capaian optimal. Nilai rata-rata legal audit sebesar 3,54 dan penilaian aset 3,40 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai proses audit dan penilaian belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Banyak perlengkapan jalan di Kawasan Tertib Lalu lintas yang tidak memiliki kejelasan status kepemilikan atau belum melalui proses pemindahtanganan sesuai ketentuan. Selain itu, penilaian aset belum dilakukan secara berkala untuk mengetahui nilai aset terkini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan penghapusan, peremajaan, atau pengadaan baru. Temuan ini selaras dengan studi Kurniawati (2022), yang menyatakan bahwa tanpa penilaian berkala, aset daerah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan cenderung menimbulkan inefisiensi anggaran.

Dimensi optimalisasi aset yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan aset secara efektif juga menunjukkan angka moderat (3,41). Di beberapa titik strategis KTL, seperti persimpangan atau tikungan tajam, ditemukan minimnya pemasangan cermin tikungan dan warning light, bahkan dalam beberapa kasus alat tersebut tersedia namun dalam kondisi tidak berfungsi. Hal ini mengindikasikan bahwa aset yang ada belum dikelola berdasarkan tingkat urgensi dan risiko lalu lintas. Padahal, prinsip manajemen aset yang efektif menekankan pada pemanfaatan aset berdasarkan kebutuhan fungsional, bukan sekadar rutinitas administrasi tahunan (Rotty dkk., 2020).

Dimensi pengembangan aplikasi yang menilai penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan aset memperoleh skor rata-rata 3,53. Meskipun telah tersedia aplikasi SIAKAD (Sistem Informasi Aset dan Keuangan Daerah), penggunaannya belum maksimal dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pengelolaan perlengkapan jalan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi belum mampu menjawab permasalahan mendasar terkait kecepatan, ketepatan, dan akurasi data. Sejalan dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016, sistem informasi manajemen aset (SIMA) menjadi salah satu prasyarat untuk menciptakan pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan, termasuk untuk perlengkapan jalan di kawasan lalu lintas padat seperti Kawasan Tertib Lalu Lintas.

Paling krusial, dimensi pengamanan dan pengawasan aset memperoleh skor rata-rata tertinggi (3,93), menandakan bahwa aspek ini merupakan kelemahan utama dalam pengelolaan perlengkapan jalan di kawasan Kawasan Tertib Lalu lintas. Mayoritas responden menyatakan bahwa aset tidak diberi tanda pengaman seperti kode atau label, tidak dilaporkan secara administratif, dan tidak diawasi baik secara fisik di lapangan maupun secara administratif dalam sistem data. Temuan ini menunjukkan ketiadaan mekanisme pengendalian internal yang memadai untuk menjamin keberlangsungan fungsi dan kondisi aset di lapangan. Padahal, menurut Siregar (2004), pengamanan dan pengawasan merupakan tahap akhir dari siklus manajemen aset yang harus dijalankan secara sistematis untuk mencegah kehilangan, penyalahgunaan, atau kerusakan yang tidak terdeteksi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa manajemen aset perlengkapan jalan di Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Probolinggo masih dihadapkan pada tantangan struktural dan teknis. Kelemahan dalam pencatatan, legalitas, penilaian, optimalisasi, dan pengawasan mengakibatkan tidak hanya kerugian nilai aset tetapi juga peningkatan risiko keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, reformasi manajemen aset diperlukan melalui pendataan ulang berbasis digital, penyusunan SOP teknis, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan SIMA yang terintegrasi. Dengan langkah tersebut, Kota Probolinggo dapat membangun sistem pengelolaan perlengkapan jalan yang lebih tertib, efisien, dan mendukung keselamatan lalu lintas secara berkelanjutan.

Pengaruh manajemen aset terhadap pengamanan dan pengawasan aset

Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa manajemen aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan dan pengawasan aset perlengkapan jalan di Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Kota Probolinggo. Berdasarkan output tabel koefisien, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,614 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), serta nilai t hitung sebesar 5,736. Hal ini menunjukkan bahwa variabel

manajemen aset secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel pengamanan dan pengawasan. Koefisien positif ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan dalam manajemen aset sebesar satu satuan akan meningkatkan efektivitas pengamanan dan pengawasan aset sebesar 0,614 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai standardized beta sebesar 0,681 memperlihatkan bahwa pengaruh tersebut termasuk dalam kategori kuat.

Temuan ini memperkuat bahwa kelemahan dalam pengamanan dan pengawasan aset di lapangan erat kaitannya dengan lemahnya pelaksanaan siklus manajemen aset yang sistematis. Sebagaimana teridentifikasi dalam data deskriptif sebelumnya, pengamanan dan pengawasan memperoleh skor rata-rata tertinggi sebesar 3,93 (semakin tinggi skor, semakin rendah kinerja), mengindikasikan bahwa sebagian besar responden menilai bahwa aset perlengkapan jalan tidak diberi kode/tanda pengaman, tidak dilaporkan secara administratif, dan tidak diawasi baik melalui data maupun realisasi fisik. Temuan ini didukung oleh observasi lapangan yang menunjukkan bahwa banyak rambu lalu lintas, warning light, dan marka jalan dalam kondisi rusak, tidak tercatat, bahkan tidak diketahui statusnya.

Berdasarkan teori manajemen aset publik yang dikemukakan oleh Siregar (2004), proses pengamanan dan pengawasan merupakan tahapan akhir dalam siklus manajemen aset yang hanya dapat dilakukan secara efektif apabila tahapan sebelumnya—seperti inventarisasi, legal audit, dan penilaian—telah dilakukan dengan baik. Dalam konteks ini, data regresi yang menunjukkan hubungan kuat antara manajemen aset dan pengamanan-pengawasan memperkuat bahwa lemahnya kinerja pengamanan aset bukanlah faktor yang berdiri sendiri, melainkan konsekuensi dari lemahnya sistem manajemen aset secara keseluruhan.

How Asset Management and Inventory Management Work Together



Gambar 3. Hubungan antara manajemen aset perlengkapan jalan dengan pengamanan dan pengawasan aset berdasarkan hasil analisis regresi linier.

Ketidakhadiran sistem informasi aset yang terintegrasi (SIMA), tidak adanya SOP pengawasan, serta lemahnya pelaporan administrasi menjadi penyebab utama lemahnya pengendalian aset.

Penelitian terdahulu oleh Rotty dkk., (2020) menegaskan bahwa pengawasan aset akan sulit tercapai apabila sistem inventarisasi dan legalitas aset belum mapan. Studi Dita & Santoso (2022) bahkan menambahkan bahwa pengamanan hanya akan berhasil jika dibarengi dengan proses penilaian yang akurat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan aset. Dengan demikian, integrasi antar dimensi dalam manajemen aset menjadi syarat mutlak untuk memastikan keberhasilan fungsi pengamanan dan pengawasan, terlebih dalam konteks aset publik yang sifatnya tersebar dan berisiko tinggi seperti perlengkapan jalan.

Secara praktis, hasil ini menunjukkan bahwa untuk memperbaiki pengamanan dan pengawasan perlengkapan jalan di kawasan KTL Kota Probolinggo, fokus utama harus diarahkan pada penguatan sistem manajemen aset secara menyeluruh. Pemerintah daerah perlu meningkatkan akurasi inventarisasi, memperjelas status hukum aset, melaksanakan penilaian secara berkala, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset berdasarkan

analisis kebutuhan aktual. Selain itu, pengembangan dan penerapan sistem informasi aset yang dapat memantau status, lokasi, dan kondisi perlengkapan jalan secara real-time akan mendukung efektivitas fungsi pengawasan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penguatan manajemen aset secara terstruktur, terukur, dan berbasis teknologi akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pengamanan dan pengawasan aset perlengkapan jalan. Temuan ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah kota untuk merancang kebijakan pengelolaan aset yang tidak hanya berbasis administrasi, tetapi juga bersifat fungsional dan preventif dalam menjamin keberlanjutan fungsi aset di ruang publik.

KESIMPULAN

Manajemen aset perlengkapan jalan di Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Probolinggo masih belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama terletak pada lemahnya sistem inventarisasi, ketidakjelasan legalitas aset, belum rutinnya penilaian, rendahnya optimalisasi pemanfaatan, serta minimnya pengamanan dan pengawasan. Meskipun terdapat upaya digitalisasi melalui aplikasi SIAKAD, implementasinya belum menyeluruh dan efektif. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh melalui pendataan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan SOP teknis, dan penguatan sistem pengawasan agar pengelolaan aset perlengkapan jalan menjadi lebih akuntabel, efisien, dan mendukung keselamatan lalu lintas secara berkelanjutan.

Permasalahan yang memengaruhi manajemen aset perlengkapan jalan di Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Probolinggo meliputi lemahnya pendataan, minimnya anggaran pemeliharaan, kurangnya kapasitas SDM, ketiadaan sistem informasi aset yang terintegrasi, serta rendahnya koordinasi antarbidang, yang berdampak pada banyaknya aset tidak tercatat, rusak, dan tidak termanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa manajemen aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan dan pengawasan aset perlengkapan jalan di Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Probolinggo. Semakin baik pelaksanaan manajemen aset—meliputi inventarisasi, legal audit, penilaian, optimalisasi, dan pemanfaatan aplikasi—maka semakin efektif pula pengamanan dan pengawasan aset di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengawasan aset merupakan dampak langsung dari belum optimalnya sistem manajemen aset yang ada, sehingga diperlukan perbaikan menyeluruh dan integratif dalam pengelolaan aset untuk menjamin keselamatan dan efisiensi pelayanan publik di sektor transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, K. (2019). Manajemen Aset Daerah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Mobil Dinas). ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online 67 Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 53(9), 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Dita, A., & Santoso, R. (2022). Pengaruh Current Ratio, Net Profit Margin, Return On Asset, Total Asset Turnover dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(3). www.idx.co.id
- Ghaleb, M. & Taghipour, S., (2022). Assessing the impact of maintenance practices on asset's sustainability. Reliability Engineering and System Safety, Volume 228, p. 108810.
- Hidayati, S. N. R. (2016). Pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset rsud pandan arang boyolali. Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah, 11(November), 33–51.
- Kurniawati, C. R. (2022). Pengaruh current ratio, total asset turnover, dan debt to equity ratio terhadap return on asset. Jurnal Cendekia Keuangan, 1(2), 101. <https://doi.org/10.32503/jck.v1i2.2832>
- Lima, E. S., McMahon, P. & Costa, A. P. C. S., (2021). Establishing the relationship between asset management and business performance. International Journal of Production Economics, Volume 232, pp. 1-18
- Nugraha M., (2023). Peningkatan Kinerja Aset Berkelanjutan Berdasarkan Dynamic Data Envelopment Analysis. Yogyakarta. Thesis. Program magister Fakultas Tekniknologi Industri, Universitas Islam Indonesia
- Riduwan, (2005). Metode & Teknik (Menyusun Tesis), Bandung: Alfabeta
- Rotty, A. T., Kalangi, L., & Lambey, L. (2020). Determinants of the Reporting Accuracy of Regional Fixed Assets Case Study in the Provincial Government of North Sulawesi. Accounting Research And, 11(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/28643>
- Siregar, Doli D. (2004). Manajemen Aset. Jakarta: Gramedia
- Siregar, D. (2016). Otonomi dan Pengeolaan Aset Daerah. (SIMA).
- Sutrisno, Mei. (2004). An Investigation of Participation Project Appraisal in Developing Countries Using

Elements of Value an Risk Management (Volume 1). Manchester: University of Manchester Institute.

Trindade, M., Almeida, N., Finger, M. & Ferreira, D., (2019). Design and Development of a Value-Based Decision Making Process for Asset Intensive Organizations. Asset Intelligence through Integration and Interoperability and Contemporary Vibration Engineering Technologies, Issue https://doi.org/10.1007/978-3-319-95711-1_60, pp. 605-623.